



▶ ANGGARAN DAERAH

Mamin OPD Perlu Libatkan PPJI

BANTUL—Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia (PPJI) Bantul minta dilibatkan Pemkab Bantul dalam menyerap anggaran makan dan minum (mamin) kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD).

Alasannya, selama ini anggota PPJI Bantul belum sepenuhnya bisa mengakses dan dilibatkan dalam pengadaan anggaran tersebut. Padahal, anggaran untuk mamin dalam kegiatan OPD di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 mencapai Rp22.844.078.739.

Ketua PPJI Bantul Febri Lestanto menuturkan selama ini secara organisasional belum pernah diajak komunikasi oleh Pemkab, "Mungkin yang ada sekarang masih orang ke orang," ungkapnya kepada *Harian Jogja*, Sabtu (11/1).

PPJI Bantul saat ini beranggotakan 70-100 pengusaha jasa boga dan katering yang tergolong profesional dan telah memiliki berbagai sertifikat. Alhasil, ada jaminan kualitas dan keamanan makanan dari anggota PPJI.

Mengingat belum diajak komunikasi, Febri mengaku PPJI Bantul akhirnya memilih aktif dengan melakukan audiensi dengan beberapa dinas. Diharapkan dengan lebih aktifnya PPJI, maka ada harmonisasi antara Pemkab dan anggota PPJI.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul Trisna Manurung mengatakan pos anggaran Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan pada APBD 2025 mencapai Rp22.844.078.739. Anggaran tersebut tidak terkena rasionalisasi karena tidak ada perintah dari Gubernur DIY untuk dirasionalisasi.

Trisna menyebut selama ini anggaran mamin dalam kegiatan OPD cukup besar. Ia mencontohkan pada APBD 2024, anggaran mamin mencapai Rp20 miliar. "Setiap tahun berkisar Rp20 miliar. Selama ini belanja tersebut kan juga melibatkan usaha mikro kecil menengah dan masyarakat Bantul. Selain itu, belanja tersebut juga memberikan kontribusi kepada peningkatan pajak daerah," ungkapnya.

Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Bantul Arif Haryanto membenarkan tidak adanya pengurangan anggaran untuk Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan.

Dalam evaluasi Gubernur DIY yang tercantum dalam Keputusan Gubernur DIY No.497/Kep/2024, tidak ada perintah rasionalisasi anggaran mamin untuk kegiatan OPD sehingga DPRD dan Pemkab Bantul tidak mengurangnya. (Jumali)